

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Tri Basuki & Utari Gayatri, 2009, *Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir)*.

Alik Alamsyah Ansyori, 2001, *Rekayasa Jalan Raya*, Malang: UMM Press. Malang.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 66.

Galang Taufan Subeki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 217.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit, Bandung: Alfabeta, hlm. 99.

Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, hlm. 35.

Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Riawan Tjandra, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Siswanto Sunarnno, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Soerjono Soekanto, 2006, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, edisi 1, cet 3, Depok: Rajawali Pers.

Suwardo & Iman Haryanto, 2018, *Perancangan Geometrik Jalan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Jakarta: Kencana group, hlm.3. Philipus

M. Hadjo, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta University Gajah Mada Press, hlm 95.

Yudhi Setiawan, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2019, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan ke-11, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 110/KPTS/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum

C. Jurnal

Bramantyo, Wido Prananing Tyas, dan Arvi Argayantoro, 2019, "*Aspek Kualitas Rumah Subsidi Pada Program Rumah Murah Berdasarkan Prespektif Penerimaan Manfaat, Studi Kasus Perumahan Mutiara Hati Semarang*",

Jurnal Permukiman Vol.14, No 1 Mei 2019.

Hernadi Affandi, “*Problematika Pengelolaan Jalan Di Era Otonomi Daerah*”, Vol. 2 No. 1, 2020

Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, “*Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto”, Vol. 12 No. 2, 2012

Victor Emanuel, 2021, “*Wewenang Penyelenggara Jalan Oleh Pemerintah Kabupaten*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Vol 9 No 1, Maret 2021

